



**PEMERINTAH  
KABUPATEN  
KAPUAS HULU**

**KAPUAS HULU  
HEBAT!**

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2022**

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU**



## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, sehingga dapat menyelesaikan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, sebagai tindak lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, disusun berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Dinas memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, diharapkan dengan tersusunnya Renja ini dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Putussibau, Januari 2022  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Kapuas Hulu



Drs.H.ABDURRASYID,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630807 198910 1 001



## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN ..	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematik Penulisan ..	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU...	8
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	37
BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	38
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah .....	38
3.3. Program dan Kegiatan .....	41
BAB IV PENUTUP.....	59



## **DAFTAR TABEL**

2.1	Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 Kabupaten Kapuas Hulu .....	9
2.2	Tabel Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
2.3	Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
3.1	Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu .....	40
3.2	Tabel Program dan Kegiatan .....	44



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2022. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022. Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pertanian dan Pangan nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pertanian Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut :

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target - target yang telah ditetapkan. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dan pangan dapat lebih optimal.



2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan, bahwa pembangunan pertanian dan pangan dilaksanakan untuk meningkatkan produksi pertanian dan pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan. Pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan pada tahun sebelumnya yang masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing dan ketersediaan pangan pada tahun 2021 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2022.
3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.
4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2021 – 2026 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2022 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2021 – 2026.

Kedudukan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan publik.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun.
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah bersama DPRD.

Penyusunan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Pertanian dan Pangan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011– 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026;
21. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu;
22. Draf usulan program pembangunan pertanian Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.
7. Untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2022 mengimplementasikan perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :



## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentaun peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, mengacu pada APBD tahun 2022 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun – tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah, serta ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.



- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian tentang proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan temuan – temuan setelah proses perbandingan tersebut dilakukan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Menguraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan dan instansi lain maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

### **BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### 1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 1.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 1.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dan rumusan tentang program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Anggaran Tahun 2021 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan APBD sebesar Rp 43.139.952.606,- yang terdiri dari 11 program dan 27 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 47.241.839.267,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 91,32%.

Hasil kinerja program/ kegiatan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 telah memenuhi target yang direncanakan. Akan tetapi masih terdapat program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dan juga terdapat program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berikut ini disajikan Tabel evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 :



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian Dan Pangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Urusan									
	Bidang Urusan									
	Pertanian dan Pangan									
	<b>Program Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan Perkantoran</b>	<b>Persentase tingkat kepuasan atas layanan internal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran	% cakupan pelayanan pertanian	90%	87%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
	Kegiatan Penyusunan dokumen kebijakan pelayanan	Jumlah Dokumen (SP, SOP)	2	2	2	2	100%	2	2	100%
	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan SDM aparatur	% penyelesaian administrasi kepegawaian	90%	87%	90%	90%	100%	90%	90%	100%



*Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022*

						Kegiatan Pengelolaan sarana dan prasarana kantor	% sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90%	87%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
						<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian kinerja dan Keuangan</b>	<b>nilai sakin</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>86,33</b>	<b>86,33</b>	<b>100%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100%</b>
						Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen (Renja, PK, Rencana Aksi, RKA, DPA, DPPA, RKT, IKU )	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	100%	8 dok	8 dok	100%
						Kegiatan Penyusunan dokumen Laporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen (Lap. Kinerja, Evaluasi Renja, Evaluasi Kinerja, Laporan Tahunan, Profil, Database, LPPD, LKPJ, RFK-0)	9 dok	8 dok	9 dok	9 dok	100%	9 dok	9 dok	100%
						Kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen (Laporan Keuangan Tahunan)	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
						Kegiatan Pendataan dan pengelolaan aset	Jumlah Dokumen (Aset)	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
						<b>Program Ketahanan Pangan</b>	<b>% Ketersediaan energi perkapita</b>								
							<b>% pangan segar layak konsumsi</b>								
						Kegiatan Penyusunan laporan harga dan pasokan pangan strategis	jumlah dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
						Kegiatan Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan GiziSKPG	jumlah dokumen	1 dok	8 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
						Kegiatan penyusunan Analisis Suplai Pangan (NBM dan PPH)	jumlah dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
						Kegiatan penyusunan analisis pengembangan cadangan pangan	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%



					Kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	jumlah pangan segar yang diuji	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	7 jenis	100%
					Kegiatan pengembangan pemanfaatan pekarangan rumah	Jumlah kelompok	15 kel	10 kel	20 kel	20 kel	100%	15 kel	15 kel	100%
					Kegiatan Analisis Situasi Ketersediaan Pangan	Jumlah Dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
					Kegiatan Pengembangan diversifikasi pangan	Jumlah peserta		150 org	150 org	150 org	100%			
					<b>program pemasaran hasil pertanian</b>	<b>jumlah produk unggulan</b>								
					Kegiatan pelaksanaan pemasaran hasil peternakan	jumlah kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	1 keg	100%
					Kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran produk pangan asal hewan	jumlah pelaku usaha yang mendapat bimbingan pengolahan produk asal hewan	5 usaha		3 usaha			5 usaha	5 usaha	100%
						jumlah pelaku usaha /kelompok yang mendapat bantuan sarana dan prasarana	2 usaha		2 usaha			2 usaha	2 usaha	100%
					Kegiatan promosi hasil produksi pertanian unggul									
					Kegiatan Pengelolaan informasi permintaan pasar dan atas hasil produksi perkebunan	Jumlah usulan harga TBS yang terverifikasi	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
					<b>Program Peningkatan Produksi pertanian</b>	<b>Produktivitas Pertanian</b>								
					Kegiatan Pengembangan tanaman Pangan	luas tanam	32.008	23.260	28.484	22.368	78,53%	32.008	32.008	100%
					Kegiatan Pengembangan tanaman hortikultura	luas tanam	196	103	190	211	111,05%	196	196	100%



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

					Kegiatan Pengembangan tanaman ubi kayu	luas tanam	656	450	625	652	113,60%	656	656	100%
					Kegiatan sistem perlindungan tanaman	% temuan opt yang terkendali	80%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	100%
					Kegiatan statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura	jumlah dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
					Kegiatan Pengembangan Sarana Produksi Peternakan	Jumlah Kelompok Petani yang mendapat bantuan	15 kel	27 kel	15 kel	9 kel	60%	15 kel	15 kel	100%
					Kegiatan pengembangan bibit unggul	jumlah bibit unggul	1150 ekor	1357 ekor	1150 ekor	3156 ekor	274,43%	1150 ekor	1150 ekor	100%
					Kegiatan pengawasan bibit dan pakan ternak	jumlah pengujian bibit ternak	5 jenis	6 jenis	5 jenis	0 jenis	0%	5 jenis	5 jenis	100%
						jumlah pengujian pakan ternak	25 kg		20 kg			25 kg	25 kg	100%
					Kegiatan Pengembangan Statistik Peternakan	jumlah dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
					Kegiatan perlindungan tanaman perkebunan	% temuan OPT yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
						jumlah serangan hama	95%		92%			95%	95%	100%
						jumlah persentase keberhasilan pencegahan kebakaran lahan perkebunan	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
					Kegiatan penyediaan sarana produksi perkebunan	jumlah petani yang mendapat bantuan saprodi	600 petani		600 petani			600 petani	600 petani	100%
						jumlah kelompok tani yang mendapat saprodi	30 poktan		30 poktan			30 poktan	30 poktan	100%
					Kegiatan penyusunan statistik pertanian	jumlah Laporan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
					Kegiatan penilaian usaha perkebunan	% usaha perkebunan dengan nilai "baik"	7 perusahaan	10 perusahaan	6 perusahaan	6 perusahaan	100%	7 perusahaan	7 perusahaan	100%
					Kegiatan perlindungan usaha perkebunan	% Konflik perkebunan yang diselesaikan	90%	86%	90%	80%	88,89%	90%	90%	100%





*Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022*

					Kegiatan Pencegahan Penyakit Hewan dan ternak	%hewan ternak yang di vaksin	70%	46,50%	70%	3,20%	4,57%	70%	70%	100%
					Kegiatan pemberantasan penyakit hewan dan ternak	% hewan sakit yang tertangani	78%	132,36%	78%	55,64%	43,40%	78%	78%	100%
					Kegiatan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan veteriner	jumlah tempat pemotongan hewan yang diawasi	18	17	18	21%	114,81%	18	18	100%
						jumlah tempat penjualan yang diawasi	20	20	20	30	148,33%	20	20	100%
						% hewan kurban yang diawasi	60%		60%			60%	60%	100%
					Kegiatan pengawasan pangan asal hewan	jumlah pelaku usaha penjual produk hewan yang diawasi	14	16	14	13	92,86%	14	14	100%



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu disajikan pada tabel berikut :

### PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah						Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Predikat SAKIP			53,96	64,75	75,54	86,33	86,33	86,33	53,96	64,75	75,54	86,33	86,33	86,33	-	
	nilai sakisip			C	CC	CC	B	B	B	C	CC	CC	B	B	BB	BB	
	tingkat kepuasan atas layanan internal			90%	90%	90%	90%	95%	90%	90%	90%	95%	95%	95%	90%	90%	
2	Skor PPH			75,07	76,34	77,78	79,14	69,56	82,18	71,80	75,40	77,90	71,60	69,56	82,18	72,00	
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian			5,28	5,78	6,01	6,6	6,6	6,04	5,28	5,78	6,01	6,6	6,6	6,04	6,7	
4	Jumlah produksi Pertanian																
	a. Jumlah produksi Tanaman Pangan																



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

- Padi (ton)			56.238,00	51.139,00	52.417,48	53.727,91	57.824,66	56.447,89	56.238,00	60.510,00	52.588,00	24.567,79	27.732,31	56.447,89	56.780
- Jagung (ton)			204,00	239,00	244,98	251,10	270,25	263,81	204,00	244,00	255,00	1.258,00	1.023,60	263,81	1.126
- Ubi Kayu (ton)			7.069,00	7.862,00	8.058,55	8.260,01	8.889,83	8.678,18	4.551,00	4,00	8.908,00	11.244,00	17.937,06	8.678,18	18.625
b. jumlah produksi Hortikultura															
- cabe (ton)			177,40	311,50	320,85	330,47	357,40	350,60	194,10	362,10	387,80	228,90	224,90	350,60	236,29
- bawang merah (ton)			-	3,90	3,98	4,06	4,14	4,22	-	3,90	-	-	3,60	4,22	3,71
c. Produktifitas tanaman pangan															
- Padi (kw/Ha) ;			25,21	25,84	26,49	27,15	24,00	28,52	24,33	25,93	22,35	26,08	28,51	28,52	49,57
- Jagung (kw/Ha)			11,97	12,27	12,58	12,89	21,21	13,54	9,14	7,40	26,35	27,95	20,76	13,54	21,52
- Ubi Kayu (kw/Ha)			190,72	195,49	200,38	205,38	210,52	215,78	190,03	201,30	200,62	209,78	257,72	215,78	261,22
d. Produktivitas Tanaman Hortikultura															
- Cabe (kw/Ha) ;			17,56	28,31	29,16	30,03	35,03	31,86	12,40	24,14	18,7	12,37	12,28	31,86	28,06
- Bawang merah (kw/Ha)			-	4,30	4,39	4,47	4,47	4,65	0,00	4,33	0	0	9	4,65	9,27
Jumlah Produksi Peternakan															
a. Jumlah produksi Peternakan															
- sapi (kg)			125.726	138.863	139.280	272.561	155.862	140.537	134.308	138.709	136.280	155.706	161.776	140.537	161.873,08
- kambing (kg)			2.066	2.650	2.730	4.956	2.586	2.983	1.501	2.577	2.478	2.535	3.993	2.983	3.994,20
- Babi (kg)			140.774	121.997	122.363	250.675	168.924	123.468	119.574	121.867	119.369	168.755	132.064	123.468	132.103,62
- ayam buras (kg)			214.362	150.870	151.021	120.300	83.059	11.474	193.815	150.763	151.290	83.017	83.206	11.474	83.230,96
- ayam ras pedaging (kg)			905.214	980.690	981.376	1.007.605	1.451.478	983.439	874.924	980.336	987.848	1.450.028	1.222.092	983.439	1.222.458,56



- Itik (kg)			301	425	489	1.793	6.623	743	341	371	386	1.673	3.551	743	978,29
b. jumlah populasi ternak															
- sapi (ekor)			7.631	7.830	8.300	7.140	6.185	9.885	7.548	7.673	8.487	6.094	6.756	9.885	7.029
- kambing (ekor)			1.662	1.790	1.915	1.166	1.008	2.346	1.510	1.666	1.155	974	1.218	2.346	1.263
- Babi (ekor)			20.471	23.910	24.269	15.020	17.704	25.377	23.485	23.806	16.624	17.651	17.002	25.377	17.070
- ayam buras (ekor)			164.350	165.990	166.488	154.133	138.323	167.991	164.499	165.694	149.644	137.772	118.320	167.991	118.317
- ayam ras pedaging (ekor)			598.707	648.910	652.155	659.857	1.154.307	661.986	571.891	647.853	653.324	1.150.854	1.025.805	661.986	1.047.066
- Itik (ekor)			5.157	4.010	4.331	2.700	9.932	5.456	5.144	3.947	3.029	4.868	7.605	5.456	4.504
a. Jumlah Produksi perkebunan															
- Kelapa sawit (ton)			641.347	650.261	655.287	701.015	1.000.000	800.867	0	1.130.610,00	748.458,87	954.224,80	1.259.264,12	800.867	303.801
- karet (ton)			17.074	17.415	17.763	18.118	15.000	19.218	15.905	16.948,00	12.679,00	12.679,00	12.686,00	19.218	12.800
- kopi (ton)			4,5	5	5,5	6	5	7	11	5,00	4,00	2,50	1,60	7	1,7
- lada (ton)			11,05	11,16	11,28	11,45	15	12,21	11	11,00	11,00	12,50	12,75	12,21	12,8
b. Produktifitas Perkebunan															
- Kelapa Sawit (Kw/Ha)			131	134	137	250	250	151	0	250,05	254,84	259,46	144,1	151	131
- karet (Kw/Ha)			7,24	7,6	7,98	9	6	8,98	7,87	7,87	5,47	5,47	5,48	8,98	5,6
- kopi (Kw/Ha)			10	10,1	10,2	10	10	10,5	7,27	7,27	10	5	4,57	10,5	4,59
- lada (Kw/HA)			5,34	5,44	5,6	8	6	6,34	5,24	5,24	5,79	5,68	5,8	6,34	5,9





### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja perangkat daerah, sebagaimana tercermin dari hasil evaluasi terhadap SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2021 dengan predikat 'BB', yang mana masih perlu dilakukan perbaikan namun tidak bersifat mendasar. Kendala ini disebabkan beberapa program/kegiatan yang telah ditetapkan masih belum dikendalikan dengan baik, belum mengacu pada target kinerja, keterbatasan pengetahuan aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan dan indikator kerjanya, belum disusunnya pedoman tentang penyusunan dokumen perencanaan di Daerah.
2. Berkaitan dengan permasalahan Ketahanan Pangan masih ada kaitannya dengan permasalahan nasional, dimana sistem cadangan dan distribusi pangan serta rantai pasokan dan logistik nasional belum terintegrasi dengan baik, sementara jumlah produksi pertanian lokal masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan utama.
3. Berkaitan dengan upaya peningkatan produksi di sektor Pertanian masih mengalami kendala dalam penyediaan sarana produksi pertanian yang dapat menunjang proses teknologi budidaya, dimana kecenderungannya bantuan sarana produksi selalu datang diwaktu yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan.
4. Kondisi Lahan Pertanian yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini memiliki kecenderungan dengan pola yang masih tersebar/ tidak dalam satu hamparan. Sehingga kesulitan dalam memfasilitasi prasarana untuk menunjang produksi pertanian.
5. Dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Penyakit Hewan dan ternak masih mengalami kendala dan permasalahan dalam hal ketersediaan vaksin untuk mengatasi penyakit ternak yang menular dan beberapa kejadian luar biasa seperti Rabies. Selain itu juga keterbatasan Sumber Daya Manusia yang bisa terlibat dalam menangani masalah penyakit ternak.
6. Masih terbatasnya/ belum tersedianya sarana pelayanan yang memenuhi standar hygiene-sanitasi (RPH-RPU) dan RPH yang ada belum bisa dimanfaatkan sehingga pengawasan kesmavet belum optimal.
7. Sumber daya manusia masih menjadi kendala dan permasalahan yang utama dalam memberikan pembinaan dan pendampingan. Jumlah Penyuluh pertanian yang ada masih belum bisa optimal dibandingkan dengan luas lahan pertanian.
8. Adanya Refocusing Penyesuaian Anggaran APBD Tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid -19 dan Pemulihan Ekonomi.



## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program – program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “Kerangka Regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogram, dapat dimanfaatkan antara lain : forum musyawarah koordinasi perencanaan seperti : MUSRENBANGPROP di tingkat Propinsi, MUSRENBANGDA di tingkat Kabupaten/Kota, MUSRENBANG Kecamatan, MUSRENBANG tingkat Desa dan MUSRENBANGNAS di tingkat Daerah, forum – forum lintas pelaku, dan konsultasi publik.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 merupakan acuan bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan.

Masyarakat luas dapat berperan serta seluas – luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang – undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program – program pembangunan yang berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program – program pembangunan;

Dalam membuat Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah wajib melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat dan Pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhannya masing – masing. Pada akhir tahun anggaran 2022, Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi



anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan – peraturan lainnya;

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil – hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.



2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada tabel berikut :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PERTANIAN DAN  
PANGAN

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kab. Kapuas Hulu	Persentase ketersediaan energi perkapita	70	%	Rp 365.890.660	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kab. Kapuas Hulu	Persentase ketersediaan energi perkapita	70	%	Rp 198.677.900
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Kapuas Hulu	Persentase kebutuhan pangan daerah dengan ketersediaan dan penyaluran pangan	70	%	Rp 156.014.400	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Kapuas Hulu	Persentase kebutuhan pangan daerah dengan ketersediaan dan penyaluran pangan	70	%	Rp 67.482.000
	- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Kapuas Hulu	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1	dok	Rp 40.004.400	- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Kapuas Hulu	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1	dok	Rp 13.480.000
	- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Kapuas Hulu	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1	dok	Rp 116.010.000	- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Kapuas Hulu	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1	dok	Rp 54.002.000
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai	Kab. Kapuas Hulu	Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai	76	%	Rp 209.876.260	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai	Kab. Kapuas Hulu	Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun	76	%	Rp 131.195.900



	dengan Angka Kecukupan Gizi		AKG				dengan Angka Kecukupan Gizi		sesuai AKG			
	- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	15	Poktan	Rp 209.876.260	- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	15	Poktan	Rp 131.195.900
2	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase kerawanan pangan yang ditindaklanjuti</b>	100	%	<b>Rp 68.528.250</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase kerawanan pangan yang ditindaklanjuti</b>	100	%	<b>Rp 47.518.000</b>
	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Tersedianya Laporan Situasi Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan</b>	1	dok	<b>Rp 68.528.250</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Tersedianya Laporan Situasi Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan</b>	1	dok	<b>Rp 47.518.000</b>
	- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	dok	Rp 68.528.250	- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	dok	Rp 47.518.000
3	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase Pangan segar yang layak konsumsi</b>	80	%	<b>Rp 24.383.910</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase Pangan segar yang layak konsumsi</b>	80	%	<b>Rp 29.803.800</b>
	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Jumlah pangan segar daerah layak konsumsi</b>	10	jenis	<b>Rp 24.383.910</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Jumlah pangan segar daerah layak konsumsi</b>	10	jenis	<b>Rp 29.803.800</b>
	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	8	jenis	Rp 24.383.910	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	8	jenis	Rp 29.803.800



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

4	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	201.305.500	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	199.999.800
		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	14.461.581.053		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	15.414.665.991
		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	35.721.400		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	32.630.000
		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	23.136.000		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	40.016.200
		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah	100	%	349.228.000		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah	100	%	453.563.000
		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	1.900.000.000		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	1.840.000.000
		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan perangkat daerah	100	%	2.425.797.000		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan perangkat daerah	100	%	2.938.768.000
		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas kondisi Barang Milik Daerah	100	%	233.898.000		Kab. Kapuas Hulu	Meningkatnya kualitas kondisi Barang Milik Daerah	100	%	953.951.800
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	26	dok	201.305.500	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	26	dok	199.999.800
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dok	64.828.500	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dok	71.507.200



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	13.391.400	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	8.179.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dok	5.286.600	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dok	5.806.000
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	dok	10.775.600	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	dok	7.796.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	dok	10.964.800	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	dok	6.968.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	dok	25.656.400	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	dok	25.341.000
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	dok	70.402.200	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	dok	74.402.600
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	44	dok	<b>Rp 14.461.581.053</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	44	dok	<b>Rp 15.414.665.991</b>



- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144	Orang	Rp 13.969.513.653	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144	Orang	Rp 14.962.767.991
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8	dok	Rp 429.101.200	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8	dok	Rp 390.720.000
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	Rp 31.522.040	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	Rp 28.618.400
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	dok	Rp 31.444.160	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	dok	Rp 32.559.600
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	4	dok	<b>Rp 35.721.400</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	4	dok	<b>Rp 32.630.000</b>
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2	dok	Rp 8.460.100	- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2	dok	Rp 24.034.000
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	dok	Rp 27.261.300	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	dok	Rp 8.596.000



	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	5	dok	Rp 23.136.000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	5	dok	Rp 40.016.200
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	dok	Rp 23.136.000	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	dok	Rp 40.016.200
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah</b>	14	dok	Rp 349.228.000	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah</b>	14	dok	Rp 453.563.000
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	Rp 13.895.200	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	Rp 6.493.000
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	Rp 45.181.400	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	Rp 29.502.000
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	Rp 23.647.800	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	Rp 15.890.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	dok	Rp 25.740.000	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	dok	Rp 9.000.000
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	laporan	Rp 42.900.000	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	laporan	Rp 18.000.000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	laporan	Rp 190.163.600	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	laporan	Rp 359.678.000



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	dok	Rp 7.700.000	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	dok	Rp 15.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	4	Unit	<b>Rp 1.900.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	4	Unit	<b>Rp 1.840.000.000</b>
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	Rp 100.000.000	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	Rp 40.000.000
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	Rp 1.800.000.000	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	Rp 1.800.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	4	laporan	<b>Rp 2.425.797.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	4	laporan	<b>Rp 2.938.768.000</b>
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	Rp 3.300.000	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	Rp 3.000.000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	Rp 184.602.000	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	Rp 182.688.000
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	Rp 11.055.000	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	laporan	Rp 98.457.000



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

									yang Disediakan			
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	Rp 2.226.840.000	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	Rp 2.654.623.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	12	Unit	<b>Rp 233.898.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	12	Unit	<b>Rp 953.951.800</b>
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	Rp 164.098.000	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	Rp 242.101.800
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	Rp 19.800.000	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	Rp 11.850.000
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	Rp 50.000.000	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	Rp 700.000.000
5	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Jumlah Kelompok Tani Yang Menierima Bantuan Sarana Pertanian</b>	76	%	<b>Rp 12.078.270.000</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Jumlah Kelompok Tani Yang Menierima Bantuan Sarana Pertanian</b>	76	%	<b>Rp 993.142.000</b>



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase Sarana Pertanian yang dimanfaatkan dengan baik</b>	80	%	<b>Rp 128.000.000</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase Sarana Pertanian yang dimanfaatkan dengan baik</b>	80	%	<b>Rp 14.284.000</b>
	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	poktan	Rp 64.000.000	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	poktan	Rp 7.142.000
	- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	poktan	Rp 64.000.000	- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	poktan	Rp 7.142.000
	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pada sektor pertanian</b>	75	%	<b>Rp 10.353.700.000</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pada sektor pertanian</b>	75	%	<b>Rp 284.067.500</b>
	- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	poktan	Rp 10.000.000.000	- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	poktan	Rp 26.925.500
	- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	911	ekor	Rp 353.700.000	- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	911	ekor	Rp 257.142.000
	<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Jumlah usaha obat hewan yang diawasi</b>	1	toko	<b>Rp 4.570.000</b>	<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Jumlah usaha obat hewan yang diawasi</b>	1	toko	<b>Rp 4.216.000</b>
	- Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	1	toko	Rp 4.570.000	- Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	1	toko	Rp 4.216.000



			yang Beredar						yang Beredar				
	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas</b>	75	%	Rp	<b>92.000.000</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas</b>	75	%	Rp <b>48.574.500</b>
	- Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	1	jenis	Rp	46.000.000	- Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	1	jenis	Rp 20.159.000
	- Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1	toko	Rp	46.000.000	- Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1	toko	Rp 28.415.500
	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase kelompok tani yang telah mendapat bantuan benih/bibit ternak</b>	50	%	Rp	<b>1.500.000.000</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase kelompok tani yang telah mendapat bantuan benih/bibit ternak</b>	50	%	Rp <b>642.000.000</b>
	- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakandari Daerah Kabupaten/Kota Lain	900	benih /bibit	Rp	1.500.000.000	- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakandari Daerah Kabupaten/Kota Lain	900	beni h/bibit	Rp 642.000.000
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian berdasarkan kebutuhan</b>	100	%	Rp	<b>35.382.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian berdasarkan kebutuhan</b>	100	%	Rp <b>18.075.873.455</b>



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase prasarana pertanian yang terselenggara dengan baik</b>	75	%	<b>Rp 560.000.000</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase prasarana pertanian yang terselenggara dengan baik</b>	75	%	<b>Rp 7.142.000</b>
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	poktan	Rp 560.000.000	- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	poktan	Rp 7.142.000
	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase prasarana pertanian yang dibangun</b>	70	%	<b>Rp 34.822.000.000</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase prasarana pertanian yang dibangun</b>	70	%	<b>Rp 18.068.731.455</b>
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	15	poktan	Rp 7.062.500.000	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	15	poktan	Rp 1.570.546.455
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	poktan	Rp 7.190.500.000	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	poktan	Rp 100.000.000
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Kapuas Hulu	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	110	poktan	Rp 19.569.000.000	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Kapuas Hulu	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	110	poktan	Rp 15.948.185.000
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5	poktan	Rp 1.000.000.000	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5	poktan	Rp 450.000.000
7	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular</b>	5	%	<b>Rp 208.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular</b>	5	%	<b>Rp 95.784.000</b>



	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase fasilitasi penanggulangan bencana</b>	80	%	<b>Rp 123.000.000</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase fasilitasi penanggulangan bencana</b>	80	%	<b>Rp 71.105.000</b>
	- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	23	kec	Rp 123.000.000	- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	23	kec	Rp 71.105.000
	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Jumlah lokasi unit usaha yang diawasi</b>	3	kec	<b>Rp 85.000.000</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Jumlah lokasi unit usaha yang diawasi</b>	3	kec	<b>Rp 24.679.000</b>
	- Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	20	unit usaha	Rp 50.000.000	- Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	20	unit usaha	Rp 16.304.000
	- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	23	kec	Rp 35.000.000	- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	23	kec	Rp 8.375.000
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase Bencana pertanian yang dapat dikendalikan</b>	75	%	<b>Rp 735.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase Bencana pertanian yang dapat dikendalikan</b>	75	%	<b>Rp 45.552.000</b>
	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase Bencana pertanian yang ditanggulangi</b>	75	%	<b>Rp 735.000.000</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase Bencana pertanian yang ditanggulangi</b>	75	%	<b>Rp 45.552.000</b>



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	23	poktan	Rp	245.000.000	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	23	poktan	Rp	7.142.000
	- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	23	poktan	Rp	245.000.000	- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	23	poktan	Rp	31.262.000
	- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	23	poktan	Rp	245.000.000	- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	23	poktan	Rp	7.148.000
<b>9</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase pelayanan rekomendasi izin usaha pertanian yang terfasilitasi</b>	100	%	<b>Rp</b>	<b>310.000.000</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase pelayanan rekomendasi izin usaha pertanian yang terfasilitasi</b>	100	%	<b>Rp</b>	<b>24.000.000</b>
	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Jumlah perusahaan yang terbit izin usaha pertaniannya</b>	1	perusahaan	<b>Rp</b>	<b>310.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Jumlah perusahaan yang terbit izin usaha pertaniannya</b>	1	perusahaan	<b>Rp</b>	<b>24.000.000</b>
	- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1	perusahaan	Rp	310.000.000	- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1	perusahaan	Rp	24.000.000



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

10	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase kelompok tani tingkat madya</b>	0,43	%	Rp 350.000.000	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Persentase kelompok tani tingkat madya</b>	0,43	%	Rp 347.400.000	
	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Cakupan bina kelompok</b>	1503	orang	Rp 350.000.000	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Kab. Kapuas Hulu	<b>Cakupan bina kelompok</b>	1503	orang	Rp 347.400.000	
	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14	BPP	Rp 250.000.000	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14	BPP	Rp 237.550.000	
	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	poktan	Rp 100.000.000	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	poktan	Rp 109.850.000	
						<b>Rp 69.152.739.773</b>							<b>Rp 41.731.345.946</b>





## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat dalam membangun pertanian di kabupaten Kapuas Hulu harus terus ditingkatkan. Melalui MUSRENBANG Tingkat Kecamatan diperoleh usulan-usulan dari masyarakat yang dikoordinir oleh BAPPEDA. Dengan kondisi seperti ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022 dapat selaras dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Penyelarasan ini juga diarahkan dengan program dan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat Propinsi dan Pusat.

Berdasarkan data hasil usulan masyarakat untuk Program dan Kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022. Kegiatan – kegiatan yang diusulkan mengarah pada program – program prioritas yaitu Program Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.



### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Secara hirarki, rumusan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan hasil perpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, propinsi dan kebijakan spesifik lokal yang digali dari berbagai potensi dan masalah spesifik lokal. Dengan demikian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan, walaupun bersifat otonom, namun masih bersifat komplementer, suplementer, dan integratif.

Atas dasar konsepsi dimaksud maka penetapan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 merupakan hasil perpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, propinsi dan kebijakan spesifik lokal Kabupaten Kapuas Hulu.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan**

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam menyusun pembangunan pertanian selama 1 (Satu) tahun kedepan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian yaitu tersusunnya sasaran strategis, program dan kegiatan selama 1 (Satu) tahun.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

**Tujuan 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah**

Dalam mencapai tujuan pertama untuk Terwujudnya Ketahanan Pangan yang berkelanjutan melalui peningkatan daya saing sektor pertanian dilakukan dengan upaya meningkatkan penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan Petani melalui peningkatan Produksi Hasil Pertanian.

**Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**



Dalam mencapai tujuan kedua untuk Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk menuju terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan melayani diarahkan pada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang telah dicapai saat ini, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kompetensi aparatur, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang telah dimiliki.

**Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

Dalam mencapai tujuan ketiga untuk Meningkatkan kualitas dan inovasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan indeks kepuasan masyarakat.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Adapun Sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah memiliki sasaran, yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Petani Melalui Peningkatan Produksi Komoditi Potensial Sektor Pertanian

Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki sasaran, yaitu :

Sasaran 1 : Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi Dan Sistem Layanan Terintegrasi, Serta Pelayanan Sederhana

Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik memiliki sasaran, yaitu :

Sasaran 1 : Peningkatan Sistem Pelayanan Publik

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat ditabel 3.1 sebagai berikut :



**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

- VISI : TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL**
- MISI 2 : MEWUJUDKAN KAPUAS HULU YANG KREATIF MENUJU DESA MANDIRI, PENGEMBANGAN AKTIFITAS EKONOMI YANG ADIL DAN PRO RAKYAT, SERTA RAMAH INVESTASI**
- MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN TERSEDIA NYA INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG BERBASIS TRANSPARANSI, RESPONSIBILITAS DAN AKUNTABILITAS**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	1.1 Meningkatnya pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi potensial sektor pertanian.	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	persen	5,18	
			1	Skor PPH	angka	72,00
			2	Jumlah Produksi Pertanian		
				Padi Sawah (ton)	ton	26.119
				Padi Ladang (ton)	ton	30.661
				Jagung (ton)	Ton	1.126
				Ubi Kayu (ton)	Ton	18.625
				Cabe (ton)	Ton	236,29
				Bawang Merah (ton)	Ton	3,71
				Jahe (ton)	Ton	184,28
				Sapi (kilo)	kilo	161.873,08
				Kambing (kilo)	kilo	3.994,20
				Babi (kilo)	kilo	132.103,62
				Ayam Ras Potong (kilo)	kilo	1.222.458,56
				Ayam Buras (kilo)	kilo	83.230,96
				Itik (kilo)	kilo	978,29
				Itik Manila (kilo)	kilo	2.573,77
	Kelapa Sawit (ton)	Ton	303.801,00			
	Karet (ton)	Ton	12.800,00			
	Kopi (ton)	Ton	1,70			
	Lada (ton)	Ton	12,80			
			3	LPE Sektor Pertanian	Persen	6,7
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	2.1 Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan	Predikat SAKIP Kabupaten kapuas Hulu	Predikat	BB	



	daerah		terintegrasi, serta pelayanan sederhana	1	Predikat SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan	Predikat	BB
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3.1	Peningkatan sistem pelayanan public		Nilai IKM Kabupaten kapuas Hulu	Skor	80,5
				1	Nilai IKM Dinas Pertanian dan Pangan	Skor	78

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan mengacu pada tujuan dan sasaran dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati Kapuas Hulu khususnya dalam pencapaian peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian untuk tahun 2022. Selain itu juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani dengan melalui peningkatan produksi hasil pertanian.

Tujuan terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui peningkatan daya saing sektor pertanian memiliki sasaran, sebagai berikut :

**Sasaran 1 :** Meningkatkan Pemberdayaan Petani Melalui Peningkatan Produksi Komoditi Potensial Sektor Pertanian untuk mendukung sasaran ini dilaksanakan melalui 9 program dan 16 kegiatan yang diantaranya adalah :

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
  - 1.1 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
  - 1.2 Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
  - 1.1 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
  - 1.1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - 1.1 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
  - 1.2 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.3 Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer



- 1.4 Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 1.5 Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - 1.1 Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - 1.2 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - 1.1 Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.2 Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
  - 1.1 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
8. Program Perizinan Usaha Pertanian
  - 1.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
9. Program Penyuluhan Pertanian
  - 1.1 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

**Sasaran 2 :** Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi Dan Sistem Layanan Terintegrasi, Serta Pelayanan Sederhana

**Sasaran 3 :** Peningkatan Sistem Pelayanan Publik

Untuk mencapai sasaran 2 dan 3 diarahkan pada peningkatan predikat SAKIP dan Nilai IKM yang mana untuk mendukung sasaran ini dilaksanakan melalui 1 program dan 8 kegiatan yang diantaranya adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Program ini dijabarkan kedalam kegiatan yang diantaranya :

  - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Indikasi pendanaan program dan kegiatan didasarkan kepada program dan kegiatan yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau stakeholder terkait.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikatif pendanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2 yang termuat pada lampiran.



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	09	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase ketersediaan energi perkapita</b>	Kab. Kapuas Hulu	70	%	Rp 365.890.660			72	%	Rp 1.257.585.886
2	09	03	2.01		<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>Persentase kebutuhan pangan daerah dengan ketersediaan dan penyaluran pangan</b>	Kab. Kapuas Hulu	70	%	Rp 156.014.400			72	%	Rp 1.026.722.000
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Kapuas Hulu	1	dok	Rp 40.004.400	APBD		1	dok	Rp 899.111.000
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Kapuas Hulu	1	dok	Rp 116.010.000	APBD		1	dok	Rp 127.611.000
2	09	03	2.04		<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai AKG</b>	Kab. Kapuas Hulu	76	%	Rp 209.876.260			78	%	Rp 230.863.886
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis	Kab. Kapuas Hulu	15	Poktan	Rp 209.876.260	APBD		18	Poktan	Rp 230.863.886





Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

3	27	01				Meningkatnya kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	100	%	35.721.400			100	%	39.293.540	
3	27	01				Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Kapuas Hulu	100	%	23.136.000			100	%	25.449.600	
3	27	01				Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kapuas Hulu	100	%	349.228.000			100	%	384.150.800	
3	27	01				Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas Hulu	100	%	1.900.000.000			100	%	2.100.000.000	
3	27	01				Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Kapuas Hulu	100	%	2.425.797.000			100	%	2.668.376.700	
3	27	01				Meningkatnya kualitas kondisi Barang Milik Daerah	Kab. Kapuas Hulu	100	%	233.898.000			100	%	252.287.800	
3	27	01	2.01			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	26	dok	201.305.500			26	dok	221.436.050
3	27	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen - Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	8	dok	64.828.500	APBD		8	dok	71.311.350
3	27	1	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1	dok	13.391.400	APBD		1	dok	14.730.540



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

3	27	01	2.01	03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1	dok	5.286.600	APBD	1	dok	5.815.260
3	27	1	2.01	04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2	dok	10.775.600	APBD	2	dok	11.853.160
3	27	01	2.01	05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2	dok	10.964.800	APBD	2	dok	12.061.280
3	27	01	2.01	06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4	dok	25.656.400	APBD	4	dok	28.222.040
3	27	1	2.01	07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	8	dok	70.402.200	APBD	8	dok	77.442.420
3	27	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	44	dok	<b>Rp 14.461.581.053</b>		44	dok	<b>Rp 14.510.787.793</b>
3	27	1	2.02	1	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	144	Orang	Rp 13.969.513.653	APBD	144	Orang	Rp 13.969.513.653
3	27	01	2.02	03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Kab. Kapuas	8	dok	Rp 429.101.200	APBD	8	dok	Rp 472.011.320





3	27	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	5	dok	Rp	23.136.000			5	dok	Rp	25.449.600
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	5	dok	Rp	23.136.000	APBD		5	dok	Rp	25.449.600
3	27	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	14	dok	Rp	349.228.000			14	dok	Rp	384.150.800
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	2	paket	Rp	13.895.200	APBD		2	paket	Rp	15.284.720
3	27	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1	paket	Rp	45.181.400	APBD		1	paket	Rp	49.699.540
3	27	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	2	paket	Rp	23.647.800	APBD		2	paket	Rp	26.012.580
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	2	dok	Rp	25.740.000	APBD		2	dok	Rp	28.314.000
3	27	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	1	laporan	Rp	42.900.000	APBD		1	laporan	Rp	47.190.000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2	laporan	Rp	190.163.600	APBD		2	laporan	Rp	209.179.960



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

3	27	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4	dok	Rp 7.700.000	APBD	4	dok	Rp 8.470.000
3	27	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	4	Unit	Rp 1.900.000.000		6	Unit	Rp 2.100.000.000
3	27	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan - Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1	Unit	Rp 100.000.000	APBD	1	Unit	Rp 100.000.000
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	3	Unit	Rp 1.800.000.000	APBD	5	Unit	Rp 2.000.000.000
3	27	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	4	laporan	Rp 2.425.797.000		4	laporan	Rp 2.668.376.700
3	27	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	1	laporan	Rp 3.300.000	APBD	1	laporan	Rp 3.630.000
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa - Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1	laporan	Rp 184.602.000	APBD	1	laporan	Rp 203.062.200



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

3	27	01	2.08	03	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1	laporan	Rp 11.055.000	APBD	1	laporan	Rp 12.160.500
3	27	1	2.08	04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1	laporan	Rp 2.226.840.000	APBD	1	laporan	Rp 2.449.524.000
3	27	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Kapuas Hulu	12	Unit	<b>Rp 233.898.000</b>		12	Unit	<b>Rp 252.287.800</b>
3	27	01	2.09	01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kapuas Hulu	5	Unit	Rp 164.098.000	APBD	5	Unit	Rp 180.507.800
3	27	1	2.09	06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	5	Unit	Rp 19.800.000	APBD	5	Unit	Rp 21.780.000
3	27	1	2.09	11	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kapuas Hulu	2	Unit	Rp 50.000.000	APBD	2	Unit	Rp 50.000.000
3	27	02			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Jumlah Kelompok Tani Yang Menierima Bantuan Sarana Pertanian</b>	Kab. Kapuas Hulu	76	%	<b>Rp 12.078.270.000</b>		77	%	<b>Rp 13.290.700.000</b>



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

3	27	02	2.01		<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Persentase Sarana Pertanian yang dimanfaatkan dengan baik</b>	Kab. Kapuas Hulu	80	%	Rp	<b>128.000.000</b>			80	%	Rp	<b>140.800.000</b>
3	27	02	2.01	01	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Kapuas Hulu	1	poktan		Rp 64.000.000	APBD		1	poktan	Rp	71.000.000
3	27	02	2.01	02	- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Kapuas Hulu	1	poktan		Rp 64.000.000	APBD		1	poktan	Rp	69.800.000
3	27	02	2.02		<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pada sektor pertanian</b>	Kab. Kapuas Hulu	75	%	Rp	<b>10.353.700.000</b>			75	%	Rp	<b>11.373.700.000</b>
3	27	02	2.02	02	- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kapuas Hulu	1	poktan		Rp 10.000.000.000	APBD		1	poktan	Rp	11.000.000.000
3	27	02	2.02	03	- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kapuas Hulu	911	ekor		Rp 353.700.000	APBD		911	ekor	Rp	373.700.000
3	27	02	2.04		<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>	<b>Jumlah usaha obat hewan yang diawasi</b>	Kab. Kapuas Hulu	1	toko	Rp	<b>4.570.000</b>			1	toko	Rp	<b>25.000.000</b>



3	27	02	2.04	01	- Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Kab. Kapuas Hulu	1	toko	Rp 4.570.000	APBD	1	toko	Rp 25.000.000
3	27	02	2.05		<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas</b>	Kab. Kapuas Hulu	75	%	Rp 92.000.000		78	%	Rp 101.200.000
3	27	02	2.05	03	- Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Kab. Kapuas Hulu	1	jenis	Rp 46.000.000	APBD	1	jenis	Rp 50.600.000
3	27	02	2.05	06	- Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Kapuas Hulu	1	toko	Rp 46.000.000	APBD	1	toko	Rp 50.600.000
3	27	02	2.06		<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>Persentase kelompok tani yang telah mendapat bantuan benih/bibit ternak</b>	Kab. Kapuas Hulu	50	%	Rp 1.500.000.000		51	%	Rp 1.650.000.000
3	27	02	2.06	01	- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakandari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Kapuas Hulu	900	benih/ bibit	Rp 1.500.000.000	APBD	900	benih/ bibit	Rp 1.650.000.000
3	27	03			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian berdasarkan kebutuhan</b>	Kab. Kapuas Hulu	100	%	Rp 35.382.000.000		100	%	Rp 39.557.199.000



3	27	03	2.01		<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase prasarana pertanian yang terselenggara dengan baik</b>	Kab. Kapuas Hulu	75	%	Rp	<b>560.000.000</b>			78	%	Rp	<b>616.000.000</b>
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi - Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	1	poktan		Rp 560.000.000	APBD		1	poktan	Rp	616.000.000
3	27	03	2.02		<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase prasarana pertanian yang dibangun</b>	Kab. Kapuas Hulu	70	%	Rp	<b>34.822.000.000</b>			72	%	Rp	<b>38.941.199.000</b>
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	15	poktan		Rp 7.062.500.000	APBD		16	poktan	Rp	7.250.000.000
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	1	poktan		Rp 7.190.500.000	APBD		3	poktan	Rp	7.397.100.000
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	110	poktan		Rp 19.569.000.000	APBD		120	poktan	Rp	22.694.099.000
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	5	poktan		Rp 1.000.000.000	APBD		8	poktan	Rp	1.600.000.000



3	27	04			<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Kab. Kapuas Hulu	5	%	Rp	208.000.000			5	%	Rp	224.500.000
3	27	04	2.01		<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase fasilitasi penanggulangan bencana</b>	Kab. Kapuas Hulu	80	%	Rp	123.000.000			81	%	Rp	134.500.000
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan - Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Kapuas Hulu	23	kec		Rp 123.000.000	APBD		23	kec	Rp	134.500.000
3	27	04	2.04		<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Jumlah lokasi unit usaha yang diawasi</b>	Kab. Kapuas Hulu	3	kec	Rp	85.000.000			3	kec	Rp	90.000.000
3	27	04	2.04	01	- Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	20	unit usaha		Rp 50.000.000	APBD		20	unit usaha	Rp	50.000.000
3	27	04	2.04	02	- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kapuas Hulu	23	kec		Rp 35.000.000	APBD		23	kec	Rp	40.000.000
3	27	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Bencana pertanian yang dapat dikendalikan</b>	Kab. Kapuas Hulu	75	%	Rp	735.000.000			77	%	Rp	745.500.000



3	27	05	2.01		<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Bencana pertanian yang ditanggulangi</b>	Kab. Kapuas Hulu	75	%	Rp	<b>735.000.000</b>			77	%	Rp	<b>745.500.000</b>
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Kapuas Hulu	23	poktan		Rp 245.000.000	APBD		23	poktan	Rp	249.500.000
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	23	poktan		Rp 245.000.000	APBD		23	poktan	Rp	255.000.000
3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab. Kapuas Hulu	23	poktan		Rp 245.000.000	APBD		23	poktan	Rp	241.000.000
3	27	06			<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Persentase pelayanan rekomendasi izin usaha pertanian yang terfasilitasi</b>	Kab. Kapuas Hulu	100	%	Rp	<b>310.000.000</b>			100	%	Rp	<b>372.000.000</b>
3	27	06	2.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah perusahaan yang terbit izin usaha pertaniannya</b>	Kab. Kapuas Hulu	1	perusahaan	Rp	<b>310.000.000</b>			1	perusahaan	Rp	<b>372.000.000</b>



Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Kab. Kapuas Hulu	1	perusahaan	Rp 310.000.000	APBD	1	perusahaan	Rp 372.000.000
3	27	7			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase kelompok tani tingkat madya</b>	Kab. Kapuas Hulu	0,43	%	Rp 350.000.000		0,44	%	Rp 360.000.000
3	27	07	2.01		<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Cakupan bina kelompok</b>	Kab. Kapuas Hulu	1503	orang	Rp 350.000.000		1538	orang	Rp 360.000.000
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kapuas Hulu	14	BPP	Rp 250.000.000		14	BPP	Rp 260.000.000
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kapuas Hulu	10	poktan	Rp 100.000.000		10	poktan	Rp 100.000.000
<b>JUMLAH</b>										<b>Rp 69.152.739.773</b>				<b>Rp 76.112.689.741</b>





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Pertanian dan Pangan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2022, dimana Renja Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan, seluruh aparatur secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2022.

Renja Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Putussibau, Januari 2022  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Kapuas Hulu



Drs.H.ABDURRASYID,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630807 198910 1 001